

**KEDUDUKAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT SUKU SEMENDO
DI KOTA PALEMBANG**

TESIS S2

**Program Studi
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro**



Oleh :

**ISKANDAR, SH
B4B 001 143**

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

**KEDUDUKAN ANAK TUNGGU TUBANG DALAM PEWARISAN
MASYARAKAT ADAT SUKU SEMENDO
DI KOTA PALEMBANG**

TESIS S2

Oleh :

ISKANDAR, SH

B4B 001 143

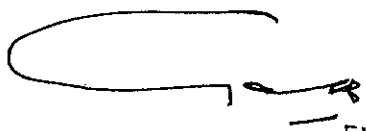
Telah Di Pertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 Oktober 2003
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

Telah disetujui

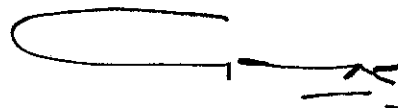
Oleh

Pembimbing utama

Mengetahui Ketua
Program Magister Kenotariatan



Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063



Prof. IGN. Sugangga, SH
NIP. 130 359 063

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft.	2399/5/mnrt/C1
Tgl.	8/3/04

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan ridho-Nya jumlah penulis berkesempatan dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***“Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo Di Kota Palembang*** maupun study sesuai dengan harapan.

Selama proses penulisan tesis ini mulai dari penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data di lapangan serta, pengolahan hasil penelitian sampai tersajikannya karya ilmiah ini, penulis telah banyak mendapat sumbangan pemikiran maupun tenaga yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis dengan penuh keikhlasan untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. I.G.N. SUGANGGA, SH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang sekaligus Dosen Pembimbing,
2. Bapak R. SUHARTO, SH.,M.Hum. selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro semarang yang juga selaku Dosen Penguji tesis,
3. Bapak Yunanto, SH. M.Hum., selaku Dosen Penguji tesis yang arif bijaksana memberikan masukan untuk perbaikan karya ilmiah ini,
4. Bapak Sukirno, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji tesis yang arif bijaksana memberikan masukan untuk perbaikan karya ilmiah ini,

5. Ibu Sri Sudaryatmi, SH, M.Hum., selaku Dosen Penguji tesis yang arif bijaksana memberikan masukan untuk perbaikan karya ilmiah ini,
6. Untuk istriku tercinta "*Masayu Halimah*" dan anak-anakku tersayang, *Willy Yuberto Andrisma*, *Yulia Rhamadina*, *Annes Tri Lutvira*, *Bayu Sutrisno*, dan *Ade Andrian*, yang dengan penuh kesabaran menunggu penulis menyelesaikan study di Magister Kenotariatan UNDIP,
7. Ayahanda dan Ibunda, Ibu Mertua, Kakak, Adik-adik dan Ipar-ipar tercinta serta semua keluarga yang tiada henti-hentinya memberikan do'a restu, semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan study di Magister Kenotariatan,
8. Teman-teman seperjuanganku di Magister Kenotariatan UNDIP Angkatan 2001,
9. Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama ini.

Penulis sadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, sehingga pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun serta berharap semoga tesis ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, September 2003

ttd

Penulis

PERNYATAAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan penulis sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka dari tulisan ini.

Semarang, Oktober 2003

Penulis

ISKANDAR,SH

ABSTRACT

The Position of "Tunggu Tubang" Child in The Custom Community Heritage of Semendo Tribe in Palembang City.

By:

ISKANDAR, SH

The custom heritage law in Indonesia is not out of the differences in the effect of kinship community structure. The custom heritage law have it's own pattern of people's traditional way of thinking with the kinship form which have a patrilineal generation system, matrilineal parental, or bilateral, although in a form of the same kinship form is not always valid the same heritage system. The and reflecting the law system and form which is valid in community. Because the heritage law is related with the human life scope, that every human must will have events, that is a legal event and commonly called passed away.

In this research the writer employed the juridical empiric approach method. The data employed in this research are secondary and primary data, collected by the library study and field study (interview). Then the data collected were analyzed qualitatively.

The philosophy of this custom is that "Tunggu Tubang" is the center of net, it means, it is a place for the whole family members together. It is a symbol that "tunggu tubang", especially home, as the place to go home (net) where the family are exist. So that, "tunggu tubang" is a symbol to know the origin of family. The existence of this "tunggu tubang" concept, initially caused the married son was "mencar" to earn for family's source of life (in local language it is called "anak ambur-amburan" or "semendo rajo-rajo"). Related whit philosophy values, which are in "tunggu tubang" custom cause the married son, strive to earn for the new life sources. Commonly, the earning of new life sources depend on forest very much which is explored. The are forced to do this because the lack of education level and the awareness on environment of Semendo Tribe people.

The majorette heritage system in the custom community of Semendo in Palembang City recently is a majorette system that is only a transfer of responsibility, that is, the responsibility on the heritage treasure of parent who were passed away to the oldest daughter (tunggu tubang).

ABTRAKSI

Kedudukan Anak Tunggu Tubang Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Suku Semendo Di Kota Palembang

Oleh:

ISKANDAR,SH

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama. Hukum kewarisan merupakan bagian yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara), data yang telah terkumpul lalu dianalisis secara analisa kualitatif.

Falsafah dari adat 'tunggu tubang' merupakan pusat jala, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa 'tunggu tubang', utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) di manapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian 'tunggu tubang' merupakan simbol untuk mengetahui asal usul keluarga. Adanya konsep "*tunggu tubang*" ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "*mencar*" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "*anak ambur-amburan*" atau "*semendo rajo-rajo*"). Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat '*tunggu tubang*', mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya pencarian sumber penghidupan baru ini sangat tergantung kepada hutan, yang kemudian ditambah, hal ini terpaksa dilakukan karena kurangnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan lingkungan dari masyarakat adat Suku Semendo.

Sistem kewarisan mayorat di masyarakat adat Semendo di Kota Palembang dewasa ini merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua perempuan (tunggu tubang).

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Sistematika Penulisan Tesis	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Masyarakat Adat Matrilineal	12
2.2. Pengertian Umum Hukum Waris Adat.....	15
2.2.1. Pengertian Dan Sifat Hukum Waris Adat	15
2.2.2. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat.....	26
2.2.2.1. Sistem Kewarisan Individual.....	26
2.2.2.2. Sistem Kewarisan Kolektif.....	27
2.2.2.3. Sistem Kewarisan Mayorat.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan	37
3.2. Spesifikasi Penelitian	38
3.3. Metode Penentuan Sampel.....	38
3.4. Lokasi Penelitian	40
3.5. Teknik Pengumpulan Data	40
3.6. Metode Analisis Data	42

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	43
4.1.1. Gambaran Umum Kota Palembang	43
4.1.2. Deskripsi Umum Suku Semendo	52
4.1.1.1. Asal Muasal suku semendo Dan Penyebarannya	52

4.1.1.2. Nilai Dan Konsepsi adat Suku semendo	56
4.1.1.3. Nilai dan konsepsi Adat Seganti setungguan	59
4.1.2. Nilai Dan Konsepsi adat Tunggu Tubang	67
4.2. Pembahasan	70
4.2.1. Implementasi Konsep Tunggu Tubang Di Masyarakat Adat Semendo Di Kota Palembang	70
4.2.2. Perkembangan Pelaksanaan Pewarisan Dalam Masyarakat Adat Semendo Di Kota Palembang	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	44
Tabel 4.2.	46
Tabel 4.3.	47
Tabel 4.4.	50
Tabel 4.5.	51
Tabel 4.6.	51
Tabel 4.7.	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dari seluruh hukum yang ada dan berlaku dewasa ini di samping Hukum Perkawinan, maka hukum kewarisan merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem dan bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal ini disebabkan hukum kewarisan itu sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa hukum dan lazim disebut meninggal dunia. Apabila ada suatu peristiwa hukum yaitu meninggalnya seseorang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seorang diatur oleh hukum. Jadi kewarisan itu dapat dikatakan sebagai himpunan Peraturan-peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris atau badan hukum lainnya.¹

¹Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta, 1974, hal. 9.

Bentuk dan sistem hukum dalam hal ini Khususnya Hukum Kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bila mana disepakati bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama Hukum Kewarisan. Masyarakat adat membentuk hukum dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia hukum waris adat bersifat pluralistik menurut suku bangsa atau kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan, oleh karena sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku bangsa atau kelompok-kelompok etnik. Masalahnya adalah, antara lain, apakah ada persamaan antara hukum waris adat yang dianut oleh berbagai suku atau kelompok etnik tersebut, dan apakah hal itu tetap dianut walaupun mereka menetap di luar daerah asalnya.²

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana dari masa ke masa proses penerusan dan peralihan harta kekayaan yang terwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya

²Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986. hal. 7.

pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.³

Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama.

Pengertian warisan adalah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum adat adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992. hal. 211.

benda (*Immateriale Goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.⁴

Dilihat dari orang yang mendapat warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran. Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "*Kewarisan Mayorat*".

Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "*anak punyimbang*" sebagai "*mayorat pria*". Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jaya Pura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "*Tunggu Tubang*" (penunggu harta) yang didampingi "*payung jurai*", sebagai "*mayorat wanita*".⁵

⁴Wirjono, Projodikoro, SH. *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991, hal. 12.

⁵Hilman Hadikusuma, *Loc. Cit*, 212.

Berbeda dengan sistem kekerabatan lainnya, kedudukan anak perempuan menjadi perhatian kepada masyarakat *Suku Semendo* yang disebut "*Tunggu Tubang*". Merekalah yang meneruskan generasi kerabatnya atau kaumnya.

Kata "Semendo" atau dilafalkan dengan "Semende" berasal dari kata "same" dan "ende", yang diartikan sesama atau kebersamaan bergotong royong. Cermin kebersamaan (di antara anggota keluarga batin) ini terpancar dari nilai atau falsafah "pusat jale" dalam adat "*Tunggu Tubang*". Etnis atau suku Semendo merupakan bagian dari kelompok "Pasemah Besar" atau "Besemah Besak". Pesemah sering menunjuk pada daerah pegunungan Bukit Barisan, tepatnya di sekitar Pagar Alam, Sumatera Selatan. Versi yang umum menyatakan bahwa asal muasal nenek moyang suku Semendo merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah (Perpidpe/perau dipo).

Sebagian lagi mengungsi ke prapau, dan dari prapau terus ke Pulau Panggung (ibukota kecamatan Sumendo sekarang). Pengungsian tersebut disebabkan oleh adanya krisis politik (pertempuran) dengan Kerajaan Mataram. Disekitar kawasan Pulau Panggung, mereka mendirikan talang-talang. Dusun ini, puyangnya adalah "puyang Lebi" terdapat "Puyang Rene" (dalam bahasa setempat berarti "Tanah" atau "Ilir" atau kira-kira berarti "Tanah Datar". Para pemuka masyarakat masa itu berkumpul untuk menentukan

Kepala Pemerintahan dan yang terpilih adalah Puyang Rene. Dari Puyang Rene, administrasi pemerintahan beralih ke Pangeran Abdus Ambang dan pada masa pangeran ini munculah istilah "Pasirah", hingga pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1854, keadaan semacam ini tetap diakui oleh G.A. de Brauw (Residen Palembang pada waktu itu) melalui surat perjanjian yang ditandatangani oleh G.A. de Brauw dengan Pangeran Anom pada bulan Agustus tahun 1854. Daerah Semendo pada waktu diskusi sebagai suatu daerah istimewa, disamping pasemah.⁶

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Semendo merupakan etnis khusus kelompok Pasemah dari Perdipe atau Perau Dipo. Semendo dan Pesemah juga sering disebut "Pasemah Ulu Manna", dan mereka inilah yang sekarang tinggal di Propinsi Bengkulu.

Saat ini, marga Semendo yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semendo yang darat, Mekakan Ulu, Mekekan Ilir, dan Bayur. Sedangkan marga Semendo yang berada di Lampung meliputi marga Rebang, Kasui, Seputih, Pugeng dan Way Tenong. Marga Semendo yang ada di Bengkulu terdiri dari Marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung, dan Nasal.

⁶Saut P. Panjaitan, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Tradisi Menebang Hutan dan Membuka Lahan Pada Suku Semendo Sumatera Selatan*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 1994. hal. 21.

Mata pencaharian primer suku Semendo adalah bercocok tanam dan berkebun, utamanya di dataran tinggi, seperti Hulu sungai Luas dan Mekakan serta disekitar daerah Danau Ranau (perbatasan antara propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung).

Suku Semendo yang pada umumnya hidup di daerah dataran tinggi atau pegunungan merupakan salah satu suku di Indonesia yang mempunyai dan menganut nilai-nilai budaya yang khas, yang telah menjadi obyek kajian menarik bagi para sosiolog, antropolog maupun ahli hukum adat.

Di Kota Palembang saat ini banyak keluarga masyarakat suku semendo yang merantau dan bertempat tinggal di Kota Palembang. Hal ini disebabkan adanya konsep "*Tunggu Tubang*" yang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "*mencar*" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "*anak ambur-amburan*" atau "*semendo rajo-rajo*"). Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat '*Tunggu Tubang*', mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Untuk jumlah masyarakat Semendo di Kota Palembang sendiri berjumlah 3.149 (tiga ribu seratus empat puluhsembilan) jiwa dari jumlah penduduk Kota Palembang pada tahun 2002 sebesar 1.339.315 jiwa.⁷

⁷ Wawancara dengan Ketua Kerukunan Semendo Di Kota Palembang tanggal 23 Juli 2003

Dari hasil pra penelitian dapat disajikan bahwa Salah satu nilai yang menarik dalam masyarakat suku ini adalah sistem pewarisannya. Masyarakat Suku Semendo menurut hukum adat menganut sistem pewarisan mayorat di mana anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal dalam pelaksanaan pewarisan yang disebut Tunggu Tubang. Hal ini semakin menarik karena sistem pewarisan yang dianut oleh masyarakat Semendo berbeda dengan masyarakat adat lainnya di propinsi Sumatera Selatan yang menganut sistem pewarisan patrilineal.

Sistem pewarisan masyarakat Semendo juga memiliki perbedaan dengan sistem pewarisan matrilineal di tempat lain seperti di Minangkabau dimana perwarisan dalam sistem ini adalah pewarisan kolektif, dan sekarang sistem pewarisan masyarakat adat suku Semendo di Kota Palembang sendiri mengalami pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo di tempat asalnya. Dimana Harta tunggu tubang sekarang bisa dibagi-bagi untuk kesejahteraan para ahli waris lainnya.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah konsep Tunggu Tubang dalam pewarisan masih dianut oleh masyarakat Suku Semendo yang bertempat tinggal di Kota Palembang dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya ?

2. Bagaimana perkembangan pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Suku Semendo di Kota Palembang ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami konsep Tunggu Tubang dalam pewarisan yang dianut oleh masyarakat Suku Semendo di Kota Palembang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Suku Semendo di Kota Palembang.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara teoritis, merupakan pengembangan ilmu pengetahuan hukum waris adat serta sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari hukum adat waris Suku Semendo di Sumatera Selatan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan hukum waris adat nasional.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan tesis ini perlu adanya sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi yang ditulis. Tesis ini terdiri dari 5 Bab yang selanjutnya akan dirinci lebih lanjut dalam Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V.

BAB I : PENDAHULUAN, yang akan diuraikan mengenai fakta-fakta yang menjadi latar belakang masalah penelitian, kemudian mengemukakan permasalahan yang timbul dan latar belakang, selanjutnya menyebutkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian serta dikemukakan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, akan memaparkan mengenai pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Suku Semendo yang terdiri dari beberapa Sub Bab yang mana Sub Bab Pertama adalah mengenai tinjauan umum hukum waris adat, pengertian dan sifat hukum waris adat, sistem pewarisan menurut hukum adat. Sub Bab kedua mengenai nilai dan konsepsi adat Suku Semendo. Sub Bab ketiga mengenai nilai dan konsepsi adat Tunggu Tubang.

BAB III : METODE PENELITIAN, akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Teknik Pengumpulan Data dan Metode Analisa Data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISA, dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan analisa guna menjawab permasalahan

yang diteliti yaitu mengenai pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat adat Suku Semendo dan perkembangannya pada saat ini.

BAB V : PENUTUP, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran yang ditemukan dalam penelitian pada penyusunan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN UMUM MASYARAKAT ADAT MATRILINEAL

Di seluruh kepulauan Indonesia pada tingkatan rakyat jelata, terdapat pergaulan hidup di dalam golongan-golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan terhadap dunia lahir dan batin. Golongan-golongan itu mempunyai tata-susunan yang tetap dan kekal dan orang-orang dalam golongan itu masing-masing mengalami kehidupannya dalam golongan sebagai hal yang sewajarnya, hal menurut kodrat alam. Tidak ada seorangpun dari mereka yang mempunyai pikiran akan kemungkinan pembubaran golongan itu. Golongan ini mempunyai pengurus sendiri, harta benda sendiri, milik keduniawian milik gaib. Golongan-golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.⁸

⁸ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan 12. CV Haji Masagung, Jakarta. 1994. hal. 78

Jadi persekutuan hukum itu merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materiil maupun kekayaan yang immateriil.⁹

Berbicara tentang sistem kewarisan, tidaklah dapat dilepaskan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat-masyarakat hukum adat di Indonesia. Apalagi masyarakat adat yang ada di Indonesia memeluk agama yang berbeda-beda, bersuku-suku, kepercayaan yang berbeda-beda, mempunyai bentuk kekeluargaan maupun kekerabatan yang berbeda-beda pula. Tetapi walaupun demikian, pada umumnya dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat-masyarakat adat di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) jenis:¹⁰

- a. *Sistem Patrilineal*, yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas, melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas, sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya.

Akibat hukum yang timbul dari sistem patrilineal ini adalah bahwa istri karena perkawinannya (biasanya perkawinan dengan sistem pembayaran uang jujuran), dikeluarkan dari keluarganya, kemudian masuk dan menjadi keluarga suaminya. Anak-anak yang lahir menjadi keluarga Bapak (Suami), harta yang ada milik Bapak (suami) yang nantinya diperuntukan bagi anak-anak keturunannya.

Istri bukan ahli waris dalam keluarga suaminya, tetapi ia anggota keluarga yang dapat menikmati hasil dari harta tersebut, seandainya pun suaminya meninggal dunia, sepanjang dia tetap setia menjanda, tinggal di kediaman

⁹ *Loc. Cit*

¹⁰ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.13-15

keluarga suaminya dengan anak-anaknya, menjaga tetap nama baik suami dan keluarga suami, dia tetap mempunyai hak menikmati harta peninggalan almarhum suaminya.

Contoh dari masyarakat adat yang menarik garis keturunan kekeluargaan patrilineal: Batak, Bali, Lampung, Nias, Seram, Ambon, dll.

- b. *Sistem Matrilineal*, yaitu sistem dimana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang perempuan sebagaimonyangnya. Akibat hukum yang timbul adalah semua keluarga adalah keluarga ibu, anak-anak adalah masuk keluarga ibu, serta mewaris dari keluarga ibu. Suami atau Bapak tidak masuk dalam keluarga Ibu atau tidak masuk dalam keluarga Istri. Dapat dikatakan bahwa sistem kekeluargaan yang ditarik dari pihak ibu ini, kedudukan wanita lebih menonjol dari pria di dalam pewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum adat ini antara lain: masyarakat Minangkabau, Enggano, dll.

- c. *Sistem Parental* atau *Bilateral*, adalah masyarakat hukum, dimana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan Ibu, terus keatas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Dalam sistem ii kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan, termasuk dalam hal kewarisan.

Contoh dari masyarakat hukum ini adalah antara lain: Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan, dll.

2.2. PENGERTIAN UMUM HUKUM WARIS ADAT

2.2.1. PENGERTIAN DAN SIFAT HUKUM WARIS ADAT

Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.

Kemudian Soepomo menyatakan bahwa "Hukum waris adat menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda (*immateriale goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya"¹¹

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas jadi hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.

¹¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Penerbit P.T. Aditya Bhakti, Bandung 1991.

Kalau kita perhatikan sifat dari hukum waris adat, nampak jelas menunjukkan corak-corak yang memang khas yang mencerminkan cara berpikir maupun semangat dan jiwa dari pikiran tradisional Indonesia yang didasarkan atas pikiran kolektif/komunal, kebersamaan serta kongrit bangsa Indonesia. Rasa mementingkan serta mengutamakan keluarga, kebersamaan, kegotong royongan, musyawarah dan mufakat dalam membagi warisan, benar-benar mewarnai dari hukum waris adat. Jarang kita melihat sengketa-sengketa mengenai pembagian harta kekayaan (warisan) dibawa ke tingkat Pengadilan. Budaya bangsa Indonesia menganggap tidak sedap kalau sampai ada perselisihan antara sesama keluarga hanya gara-gara soal warisan.

Proses peralihan harta kekayaan ini dapat dimulai sejak pewaris itu sendiri masih hidup dan proses itu berjalan terus hingga keturunannya itu masing-masing menjadi keluarga baru dan berdiri sendiri yang kelak pada gilirannya juga akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya (keturunannya). Biasanya proses pewarisan dimulai sejak pemilik harta kekayaan itu meninggal dunia.

Hal yang terpenting dalam masalah pembagian harta warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensialia (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seseorang atau beberapa orang ahli waris yang hendak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concreto" yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima kekayaan itu, akan selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :¹²

- Unsur pertama untuk menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seorang peninggal warisan dengan harta kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai di mana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan dan si ahli bersama-sama berada.

¹² Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan 12. CV Haji Masagung, Jakarta. 1994.

Kita harus mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan dimasa pemiliknya masih hidup yang lazimnya disebut penghibahan dan proses pada waktu pemiliknya meninggal dunia yang pada umumnya disebut warisan.

Hukum waris adat ini mempunyai corak dan sifat tersendiri yang memiliki ciri khas bangsa Indonesia dan tentu saja hal ini membedakannya dari hukum Islam maupun hukum waris adat. Perbedaan terutama terletak pada latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang ber-Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat kekeluargaan, saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.

Alam pikiran bangsa Indonesia yang murni itu berasaskan kekeluargaan dimana kepentingan seluruh masyarakat Indonesia untuk hidup rukun dan damai lebih diutamakan dan sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Jika pada beberapa tahun belakangan ini sudah nampak kecenderungan masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan diri sendiri dan kebendaan dengan tidak lagi

krisis akhlak, yang antara lain disebabkan pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia dan telah menjelajah alam pikiran bangsa Indonesia.

Hukum waris adat menunjukkan corak-corak yang khas dari alam pikiran tradisional bangsa Indonesia. Hukum waris adat ini bersendi atas prinsip yang timbul dari alam pikiran komunal serta kongkrit bangsa Indonesia.

Menurut Soepomo yang menyatakan : Hukum waris adat, menunjukkan sifat atau corak-corak yang khas bagi aliran pikiran tradisional bangsa Indonesia, yang bersendi atas prinsip-prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal dan kongrit bangsa Indonesia.¹³

Aliran pikiran komunal yang dimaksud adalah bahwa manusia yang satu dengan yang lainnya saling bergantung, sehingga dalam kehidupannya selalu memikirkan masyarakat atau individu yang terikat di dalam suatu masyarakat sifat komunal akan tampak antara lain pada peristiwa ditanggukanya pembagian harta peninggalan para waris yang antara lain dikarenakan sebagai berikut :

¹³ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987, hal. 34.

- a. Semua atau sebagian harta peninggalan masih tetapi dikuasai oleh orang tua (duda/janda) yang masih hidup, sehingga pembagian harta peninggalan ditangguhkan pembagiannya sampai duda/janda itu wafat.
- b. Kesatuan harta masih tetapi dipertaruhkan untuk biaya pemeliharaan para waris yang belum dewasa atau yang belum mampu melakukan perbuatan hukum (kesehatannya terganggu dan sebagainya).
- c. Wujud, sifat dan fungsi bendanya belum dapat dilakukan pembagian untuk mempertahankan kehormatan keluarga (harta pusaka tinggi).
- d. Harta peninggalan terlalu sedikit tidak seimbang dengan para warisnya sehingga harta peninggalan itu dititipkan pada salah satu warisnya.
- e. Adanya wasiat dari pewaris untuk menangguhkan pembagian warisan.
- f. Ada di antara para pewaris yang belum hadir dalam pertemuan yang diadakan para waris dan belum diketahui alamatnya, sehingga bagiannya dijadikan "gantungan" yang dititipkan kepada salah seorang waris.

- g. Adanya kesepakatan bersama para waris. Apabila ada alasan seperti yang telah disebutkan di atas, maka penangguhan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris harus dilakukan meskipun salah satu dari para waris menginginkan agar harta segera dibagi-bagi secara individuail.

Dan juga aliran pikiran yang kongkrit artinya alam pikiran tertentu dalam pola pikiran, selalu diberi bentuk benda atau tanda-tanda yang kelihatan secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini tampak dalam peristiwa misalnya pemberian tanah kepada anak laki-laki yang telah dewasa sebelum si pewaris meninggal dunia atau pemberian perhiasan kepada anak perempuan yang sudah mentas.

Oleh karena itu maka hukum waris adat ini memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris barat antara lain :

1. Hukum waris adat tidak mengenal bagian tertentu dari bagi tiap-tiap waris "*Legitieme portie*", akan tetapi menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar

persamaan hak, hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap waris.

2. Harta warisan tidak boleh dipaksakan untuk dibagi di antara para ahli waris.

Hukum waris barat ini yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- a. Mengenal hak tiap-tiap ahli waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan, bagian warisan menurut ketentuan undang-undang (*"wettelijk erfdeel"* atau *"legitieme portie"* Pasal 913 KUHPerdata sampai Pasal 929 KUHPerdata).
- b. Menentukan adanya hak mutlak dari ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan (Pasal 1066 KUHPerdata).

Sedangkan jika kita mengadakan perbandingan dengan Hukum Waris menurut hukum Islam maka akan ditentukan perbedaan-perbedaan prinsip yang antara lain untuk hukum adat waris :

- a. Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat dibagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya ditunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi.
- b. Tidak ditentukan secara pasti bagian harta peninggalan bagi para waris. Pembagiannya dilakukan secara bersama-sama dengan rukun dan memperhatikan keadaan khusus tiap waris.
- c. Dikenal sistem penggantian waris artinya keturunan dari ahli waris utama dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris apabila waris utama ini meninggal dunia terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan.
- d. Anak angkat berhak untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang tua angkat yang berupa harta gono-gini dari orang tua angkat.

- e. Tidak mengenal adanya hibah bagi waris yang sedianya akan menerima bagian warisan.
- f. Untuk anak perempuan tunggal khususnya di Jawa dapat mewaris semua harta peninggalan sehingga dapat menutup hak untuk mendapatkan harta peninggalan bagi kakek neneknya dan saudara-saudara orang tuanya.
- g. Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang masing-masing yang terdapat dalam harta peninggalan itu.

Hukum Waris Islam :

- 1. Para waris setiap waktu dapat menuntut untuk diadakannya pembagian harta warisan.
- 2. Bagian dari para ahli waris telah ditentukan menurut ketentuan hukum Islam, dimana anak laki-laki mendapat dua kali bagian harta peninggalan dari anak perempuan.
- 3. Tidak mengenal penggantian waris.

4. Anak angkat tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.
5. Mengenal adanya ketentuan mengenai hibah kepada para waris.
6. Menjamin kepada anak perempuan untuk mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya.
7. Harta peninggalan merupakan satu kesatuan harta warisan.

Sifat-sifat kekeluargaan dari masyarakat dan pengaruh dari sifat ini terdapat pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan sangat berkaitan erat dengan hukum adat waris. Hal-hal yang mempengaruhi perkembangan hukum waris adat antara lain yaitu perubahan-perubahan sosial yang terjadi di masyarakat dan penerapan peraturan hukum asing secara *in concreto* oleh para hakim agama walaupun pengaruhnya sangat kecil.

2.2.2. SISTEM KEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT

Di bawah ini penulis akan menguraikan tiga sistem kewarisan menurut hukum adat Indonesia, yaitu :

2.2.2.1. SISTEM KEWARISAN INDIVIDUAL

Ciri sistem kewarisan individual ini bahwa harta peninggalan itu dibagi-bagikan kepemilikannya kepada para waris. Kebaikan dari sistem individual ini antara lain bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka para waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ini ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan, hal ini dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem pewarisan secara individual ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.

2.2.2.2. SISTEM KEWARISAN KOLEKTIF

Ciri sistem kewarisan kolektif ini yaitu harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaannya dan pemilikannya, melainkan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Kebaikan dari sistem kolektif ini dapat terlihat apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan bagi kelangsungan harta anggota keluarga besar tersebut.

Kelemahan dari sistem kolektif ini yaitu menimbulkan cara berpikir yang terlalu sempit, kurang terbuka karena selalu terpancang pada kepentingan keluarga besarnya saja. Sistem pewarisan kolektif ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Minangkabau.

2.2.2.3. SISTEM KEWARISAN MAYORAT

Ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:¹⁴

1. Mayorat Lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.
2. Mayorat Perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat ini terletak kepemimpinan anak tertua yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal untuk mengurus harta kekayaan memanfaatkannya untuk kepentingan seluruh anggota keluarga. Kelemahan akan tampak apabila anak tertua ini ternyata tidak mampu mengurus harta kekayaan orang tuanya itu.

¹⁴. Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit*, hal. 105.

Ketiga sistem ini tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu dimana sistem kewarisan itu berlaku, sebab dapat dijumpai suatu bentuk susunan masyarakat yang menganut lebih dari satu sistem kewarisan seperti yang dimaksud di atas.

1. NILAI DAN KONSEPSI ADAT SUKU SEMENDO

Sebagai suatu komunitas, maka dalam pergaulan sosialnya, Suku Semendo memiliki organisasi, dan kelembagaan sosial, berikut tatanan nilai-nilai sosialnya, yang melandasi sikap dan perilaku kehidupannya. Oleh karena itu, "nilai" diartikan sebagai *"ideas Concerning desirable"*, yaitu idea, persepsi, dan anggapan mengenai apa yang patut (seyogya/layak) yang harus dituruti (baik) dan apa yang semestinya tidak dituruti (baruk). "Nilai" inilah yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penggerak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan pergaulan sosial suku Semendo, terhadap banyak "nilai" yang diamati, diantaranya "seganti setungguan" dan "tunggu tubang".

2. NILAI DAN KONSEPSI ADAT “SEGANTI SETUNGGUAN”

merupakan falsafah hidup Lembaga Adat Lampik Merdike Due Jurai Pasemah dan Semende. Tata nilai “seganti setungguan” berisikan kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, falsafah, dan prasetia kehidupan yang mencakup sikap dan perilaku, larangan, dan nilai pribadi dalam hidup bermasyarakat.

3. NILAI DAN KONSEPSI ADAT “TUNGGU TUBANG”

Kecuali nilai dan konsepsi adat “seganti setungguan”, nilai dan konsepsi adat yang menonjol pada masyarakat Semendo adalah “Tunggu Tubang”, yang mengharuskan anak perempuan tertua sebagai pemelihara dan penerus harta bersama keluarga (rumah, sawah, kebun, tambak dan sebagainya). Harta tersebut bukan berarti dihaki oleh anak perempuan. Hak kepemilikan tetap ada pada keluarga besar. Sekarang dalam hal lalu lintas perbankan, harta

yang dipelihara anak Tunggu Tubang tadi terbukti tidak dapat (tidak diterima oleh bank) dijamin. Prinsip keutamaan anak wanita tertua ini, sekilas memang ada persamaan dengan adat Minangkabau. Bahkan manakala dilihat arsitektur rumah tradisional Minangkabau.

Konsep "Tunggu Tubang" ini menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "mencar" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "anak ambur-amburan" atau "Semendo Rajo-rajo"). Ditetapkannya anak wanita sebagai "Tunggu Tubang" dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta 'Tunggu Tubang' dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi "Tunggu Tubang" mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga.¹⁵

¹⁵. Uraian didasarkan pada intisari karya Madrie, yang berjudul *"Seri Mengenal Etnis Semende Seganti Setungguan"*, seperti yang dipaparkan kembali dalam harian umum SRIWIJAYA POST, Minggu, 10 April 2001.

Falsafah dari adat ini adalah bahwa "Tunggu Tubang" merupakan pusat jala, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa "Tunggu Tubang", utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) dimanapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian "Tunggu Tubang" merupakan simbol untuk mengetahui asal-usul keluarga. Tentang kedudukan anak perempuan tertua pada orang Semendo dimaksudkan supaya dapat memegang bagian-bagian terpenting dari harta turun-temurun.¹⁶

Selain "jala" dalam adat "Tunggu Tubang" ini juga harus ada balau (tombak), kapak, dan guci. Balau (tombak), artinya bila diminta kesana-kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berarti bahwa dalam mengapak harus ditengah-tengah. Dalam mengurus keluarga harus dari kedua belah pihak. Guci, berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dijaga dengan rapat.

¹⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jabatan, 2000, hal. 44.

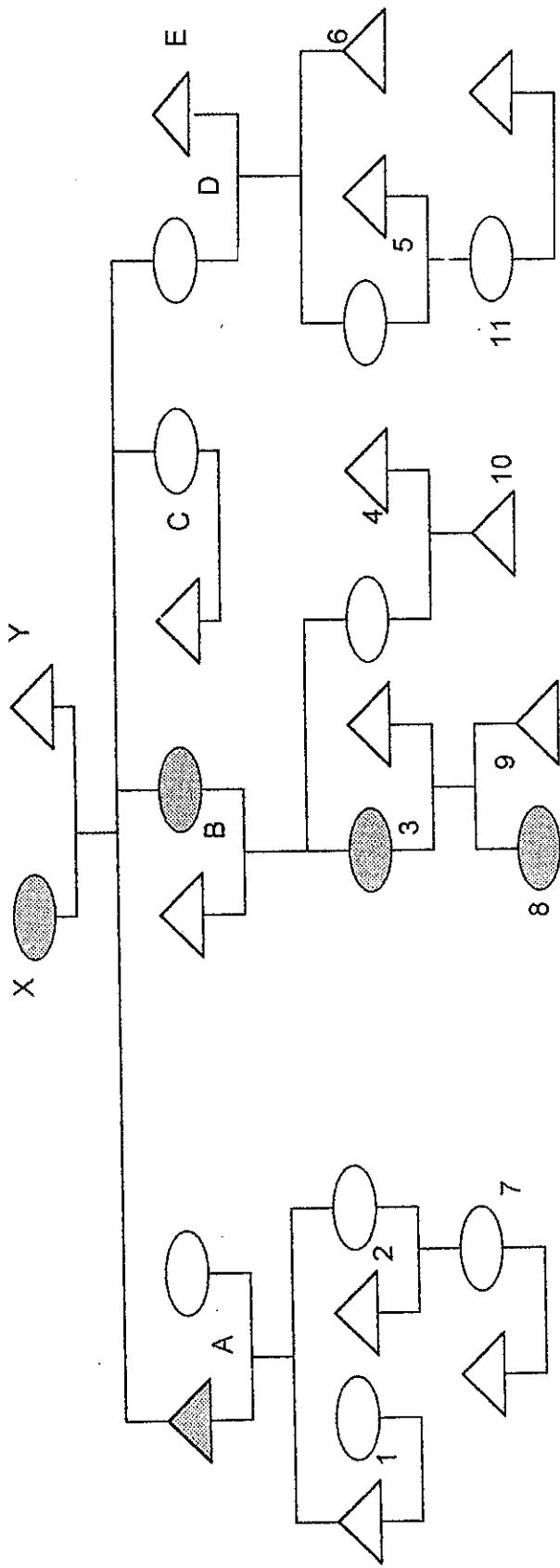
Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat "Tunggu Tubang" mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya, pencarian sumber penghidupan baru ini sangat tergantung kepada hutan, yang kemudian dirambah.

Pada umumnya masyarakat di desa ini masih tetap berpegang teguh pada tata tertib adat yang dibawa orang tua mereka dari daerah asalnya. Hal mana masih nampak pada waktu peralatan perkawinan, khitanan, begitu pula dalam hal pewarisan. Dalam pergaulan sehari-hari bahasa yang digunakan adalah bahasa semende.

Susunan kekerabatannya bertumpu pada garis keturunan wanita dimana anak wanita tertua berkedudukan sebagai Tunggu Tubang yang didampingi anak laki-laki tertua sebagai jenang Jurai dan Jenang Jurai pada generasi di atasnya berkedudukan sebagai payung Jurai yang bertindak sebagai sesepuh kerabat dan sebagai kepala adat. Setiap permasalahan adat yang muncul akan diselesaikan secara musyawarah anggota kerabat atau keturunan ibu, yang dihadiri oleh Payung

Jurai, Jenang Jurai, Apit Jurai, Tunggu Tubang dan saudara-saudaranya yang lain dari satu ibu asal. Misalnya untuk membicarakan tentang kelalaian Tunggu Tubang terhadap harta pusaka atau terjadinya perbuatan yang disebut meraib, yaitu pengambilan harta tubang secara paksa oleh Jenang Jurai.

Susunan kekeluargaan Masyarakat Suku Semendo dapat disajikan sebagai berikut:



Keterangan:

○ : Wanita

△ : Pria

┌ : Kawin

└ : Keturunan

1 : Jenang Jurai dalam keluarga A

2 : Tunggu Tubang dalam Keluarga A

X : Nenek, Ibu asal keturunan

Y : Kakek

A : Anak Lelaki tertua dari X dan Y

Jenang Jurai dari B-C-D

Payung Jurai dari Keturunan X dan Y

B : Tunggu Tubang dari Keturunan X dan Y

○ : 3 dan 8 Tunggu Tubang Keturunan X dan Y

E : Apit Jurai

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁷

Menurut Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.¹⁸

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenarannya ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua buah pola pikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, disini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran

¹⁷. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 6.

¹⁸. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.

yang logis sedang empirisme kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.¹⁹

3.1. METODE PENDEKATAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang empiris. Pendekatan *yuridis empiris* digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Suku Semendo. Dalam melakukan pendekatan yuridis empiris ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu : *pertama*, menyesuaikan metode ini lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; *kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; *ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.²⁰

¹⁹. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 36.

²⁰. Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

3.2. SPESIFIKASI PENELITIAN

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.²¹

3.3. METODE PENENTUAN SAMPEL

3.3.1. POPULASI

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka kerap kali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar.²²

²¹. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

²². Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*. hal. 44.

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada peraturan yang ketat secara mutlak menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi.²³ Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menetapkan jumlah sampel yang sekaligus menjadi responden sebagai berikut :

- Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) di Kota Palembang;
- 5 (lima) anggota masyarakat Suku Semendo yang menjadi anak Tunggu Tubang di Kota Palembang.

3.3.2. TEKNIK SAMPLING

Dalam teknik ini teknik sampling yang digunakan adalah *stratified random sampling* yaitu sampel yang bertingkat atau berstrata. Kebaikan menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan.²⁴

²³. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 47.

²⁴. Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hal. 57.

Kota Palembang memiliki 14 (empatbelas) Kecamatan. Dari 14 (empatbelas) Kecamatan terdapat 1 (satu) kecamatan banyak berpenduduk yang asli dari masyarakat adat Semendo. Kecamatan ini terdiri dari 9 (sembilan) desa kemudian diambil satu desa yaitu Kelurahan 17 Ilir sebagai sampel.

3.4. LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Ilir Timur I Kelurahan 17 Ilir Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan. Pemilihan lokasi ini didasari oleh adanya kenyataan bahwa di Kelurahan 17 Ilir ini masyarakatnya majemuk dan letaknya ditengah Kota Palembang, jadi pengaruh interaksi sosial terhadap budaya sangat besar sekali.

3.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui observasi/pengamatan, interview/wawancara, questioner/angket.²⁵

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa Ketua Lembaga Adat Suku Semendo dan anggota masyarakat sebagai informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan, dengan menelaah buku literatur, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²⁶ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yang ada hubungannya dengan pelaksanaan pewarisan dalam masyarakat Suku Semendo.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat; bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer; dan bahan hukum tertier yakni bahan yang

²⁵. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 11.

²⁶. *Ibid*, hal. 11.

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁷

3.6. METODE ANALISIS DATA

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian diseleksi yang sesuai untuk digunakan menjawab pokok permasalahan penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁸

²⁷. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 52.

²⁸. Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 250.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. HASIL PENELITIAN

4.1.1. GAMBARAN UMUM KOTA PALEMBANG

Kota Palembang sebagai ibu kota propinsi sekaligus merupakan salah satu daerah Tingkat II dalam Propinsi Sumatera Selatan, terletak diantara $2^{\circ} 52^1$ sampai $3^{\circ} 5^1$ Lintang Selatan dan $104^{\circ} 37^1$ - $104^{\circ} 52^1$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 12 meter di atas permukaan laut, terdiri dari 14 Kecamatan dan 103 Kelurahan.

Kota Palembang dahulunya adalah Kota Air. Jarak kota Palembang dengan kota/kabupaten lain adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Jarak Kota Palembang dengan Kota/Kabupaten lain di Sumatera Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	JARAK(KM)
1.	Palembang-Lubuk Linggau	390
2.	Palembang-Baturaja	384
3.	Palembang-Lahat	226
4.	Palembang-Pagar Alam	276
5.	Palembang-Muara Enim	183
6.	Palembang-Sekayu	124
7.	Palembang-Banyuasin	60
8.	Palembang-Kayu Agung	66

SumberData Sekunder: Palembang Dalam Angka 2002 hal. 3

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 23 Tahun 1988 Tanggal 6 Desember 1988 tentang perubahan batas wilayah Kota Palembang, Kabupaten Dati II Musi Banyu asin dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dinyatakan bahwa:

- a. Sebelah Utara : Dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten Kecamatan Talang Kelapa

Kabupaten Dati II Musi Banyu
Asin;

b. Sebelah Selatan : Dengan Desa Bakung Kecamatan
Indralaya Kabupaten Ogan
Komeriing Ilir dan Kecamatan
Gelombang Kabupaten dati II
Muara Enim;

c. Sebelah Timur : Dengan Balai Makmur Kecamatan
Banyu Asin I Kabupaten Dati II
Musi Banyu Asin;

d. Sebelah Barat : Dengan Desa Sukajadi
Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Dati II Musi Banyu
Asin.

Berdasarkan hasil sensus Penduduk 2000, jumlah
penduduk Kota Palembang pada tahun 2002 sebesar
1.339.315 jiwa.

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk di Kota Palembang Hasil Sensus Tahun 2002

No	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Ilir Barat II	32.072	32.633	64.705
2.	Gandus	25.003	25.130	50.133
3.	Seberang Ulu I	73.907	74.058	147.965
4.	Kertapati	39.206	39.489	78.695
5.	Seberang Ulu II	42.032	44.786	86.818
6.	Plaju	40.568	40.841	81.409
7.	Ilir Barat I	55.705	55.192	110.897
8.	Bulit Kecil	23.888	23.922	47.810
9.	Ilir Timur I	40.112	40.288	80.400
10.	Kemuning	42.188	42.743	84.931
11.	Ilir Timur II	81.095	81.047	162.142
12.	Kalidoni	43.507	43.576	87.083
13.	Sako	45.699	46.918	92.616
14.	Sukarami	82.214	81.496	163.710
Total		667.196	672.116	1.339.315

Sumber Data Sekunder: Palembang Dalam Angka 2002, hal. 50

Untuk jumlah masyarakat Semendo di Kota Palembang sendiri berjumlah 3.149 (tigaibu seratus empat puluhsembilan) jiwa.

Tabel 4.4. JUMLAH MURID DAN SARANA PENDIDIKAN (TK-SMU) DI KOTA PALEMBANG TAHUN 2002

No	Kecamatan	TK			SEKOLAH DASAR			SMP			SMU		
		Murid	Guru	TK	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah
1.	Ilir Barat II	378	31	9	6.430	287	29	2.010	133	2	0	0	0
	Swasta				125	87	2	409	95	5	2.567	99	4
2.	Gandus	1.046	27	8	5.447	196	24	4.944	254	6	500	32	1
	Swasta				274	10	1	2.249	222	11	2355	111	8
3.	Seberang Ulu I	637	58	14	16.809	717	70	1.764	88	2	805	52	1
	Swasta				1.200	78	8	2.005	223	11	1.361	133	7
4.	Kertapati	542	20	5	9.844	460	54	4.929	280	6	4.607	282	4
	Swasta				721	35	5	1.569	190	11	3.50	269	11
5.	Seberang Ulu II	521	53	10	5.371	258	22	2.473	137	2	1.024	45	1
	Swasta				649	32	3	2.439	265	15	3.775	206	7

6.	Plaju	Negeri	654	50	12	7.961	374	39	4.094	227	4	1.353	102	2
		Swasta				2.966	116	13	3.753	348	21	7.401	349	16
7.	Ilir Barat I	Negeri	1.079	129	25	12.534	715	57	3.210	167	4	1.445	88	2
		Swasta				812	39	2	1.408	107	7	537	41	4
8.	Built Kecil	Negeri	543	50	8	4.949	264	19	2.009	410	10	1.354	85	2
		Swasta				2.375	76	5	1.860	149	9	1.965	135	8
9.	Ilir Timur I	Negeri	1.324	87	23	17.663	17.663	54	2.351	130	4	810	41	2
		Swasta				900	900	2	450	40	3	447	56	3
10.	Kemuning	Negeri	1.424	60	13	6.291	6.291	25	2.496	123	3	637	39	1
		Swasta				4.236	4.236	11	2.056	169	9	1.411	60	4
11.	Ilir Timur II	Negeri	1.363	100	25	9.016	9.016	42	1.772	90	2	820	60	1
		Swasta				4.537	4.537	9	21.896	211	15	3.853	234	8
12.	Kalidoni	Negeri	603	59	13	12.038	12.038	56	1.495	133	2	0	0	0
		Swasta				3.313	3.313	11	653	78	5	850	92	4

13.	Sako	Negeri	1.285	107	12	9.279	9.279	45	2.248	119	2	2.325	139	2
		Swasta				1.511	1.511	4	2.003	224	9	7.296	407	11
14.	Sukarami	Negeri	1.285	128	38	10.012	10.012	25	3.259	245	6	661	39	1
		Swasta				969	969	2	3.020	232	13	1.998	186	9

Sumber Data sekunder: Palembang dalam Angka 2002

**Tabel 4.4. Suasana Pendidikan Formal dan Sarananya di
Kecamatan Semendo 1993**

No	Jenis/Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Prasarana Fisik (Lokal)
1	2	3	4	5	6
1.	TK	2	2	86	3
2.	a. SD. Negeri	44	306	5904	272
	b. SD. Inpres	24	145	2567	180
	c. Madrasah/Ibtidaiyah Negeri	1	8	120	6
	d. SD. Swasta/Islam	7	25	920	37
3.	a. SMTP Negeri	7	40	803	31
	b. Madrasah/Tsanawiyah Negeri	2	8	250	4
4.	SMA Swasta Umum	1	5	32	1

Sumber Data Sekunder: Data Monografi Kecamatan Semendo, 1993

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tabel 4.5. Tingkat Pendidikan Penduduk Semendo di Kota Palembang Tahun 2002

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	SMU	203	333
2.	D1,D2 DAN D3	62	32
3.	S 1	293	201
4.	S 2	14	6

Sumber data sekunder: Rekapitulasi Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) Kota Palembang Tahun 2002

Tabel 4.6. Pekerjaan Masyarakat Semendo di Kota Palembang Tahun 2002

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	476
2.	TNI/POLRI	105
3.	PEDAGANG	209
4.	LAIN-LAIN	354

Sumber data sekunder: Rekapitulasi Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) Kota Palembang Tahun 2002

Tabel 4.7. Jumlah Pemeluk Agama Di Masyarakat Semendo Kota Palembang Tahun 2002

No	Agama	Jumlah
1.	ISLAM	3.149
2.	KRISTEN KATOLIK	-
3.	KRISTEN PROTESTAN	-
4.	HINDU	-
5.	BUDHA	-

Sumber Data Sekunder: Rekapitulasi Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) Kota Palembang, Tahun 2002

4.1.2. DESKRIPSI UMUM SUKU SEMENDO

4.1.1.1 ASAL MUASAL SUKU SEMENDO DAN PENYEBARANNYA.

Kata "Semendo" atau dilafalkan dengan "Semende" berasal dari kata "Same" dan "Ende", yang diartikan sesama atau kebersamaan bergotong-royong. Cermin kebersamaan (diantara anggota keluarga batih) ini terpancar dari nilai atau falsafah "pusat jale" dalam adat "Tunggu Tubang".

Penelitian lapangan menunjukan belum ditemukan data tertulis (resmi) atau prasasti mengenai asal muasal nenek moyang suku Semendo. Namun, dari wawancara yang dilakukan, hampir semua responden memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini. persepsi tadi hidup berdasarkan penuturan dari mulut ke mulut dari orang-orang tua, sehingga menjadi semacam legenda.

Etnis atau suku Semendo merupakan bagian dari kelompok "Pasemah Besar" atau "Besemah Besak". Pasemah sering menunjuk pada daerah pegunungan Bukit barisan, tepatnya di sekitar Pagar Alam, Sumatera Selatan.

Versi yang umum menyatakan bahwa asal muasal nenek moyang suku Sumendo merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah (Perdipe/ Perau dipo).

Sebagian lagi mengungsi ke Prapau, dan dari Prapau terus ke pulau Panggung (Ibukota kecamatan Sumendo sekarang), pengungsian tersebut disebabkan oleh adanya krisis politik (Pertempuran) dengan kerajaan Mataram.

Di sekitar kawasan pulau panggung, mereka mendirikan talang-talang. Dusun ini, "Puyang Lebi" terdapat "Puyang Rene" (dalam bahasa setempat berarti "tanah" atau "ilir" atau kira-kira berarti "Tanah Datar"). Para pemuka masyarakat masa itu berkumpul untuk menentukan kepala Pemerintahan dan yang terpilih adalah Puyang Rena. Dari Puyang Rene, administrasi pemerintahan beralih ke Pangeran Adus Ambang, dan pada masa pangeran ini munculah istilah "pasirah", hingga pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Pada tahun 1985, keadaan semacam ini tetap diakui oleh G.A. de Brauw (Residen Palembang pada waktu itu) melalui surat perjanjian yang ditanda tangani oleh G.A. de Brauw dengan pangeran Anom pada bulan Agustus tahun 1954. Daerah Semendo pada waktu diakui sebagai suatu daerah istimewa, disamping pasemah.

Pada tahun 1983, struktur pemerintahan Marga dengan Pasirahnya, dihapuskan dari seluruh Sumatera Selatan.

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Semendo merupakan etnis khusus kelompok Pasemah dari Perdipe atau perau Dipo, Semendo dan Pesemah juga sering disebut "Pasemah Ulu Mana", dan mereka inilah yang sekarang tinggal di Propinsi Bengkulu.

Sejak masuknya penjajah belanda di Daerah Pasemah dan Semendo pada sekitar tahun 1864– 1866, terjadi migrasi masyarakat Semendo ke propinsi Lampung dan Bengkulu. Migrasi secara besar-besaran terjadi pada tahun 1876, melalui daerah Pulau Beringin, Pulau Panggung, menuju ke Rebang, Kasui Hulu, Way Besi, Mutar Alam, Ulak Rengas, Ulu Semong, Sekampung, Talang Padang dan Ketapang.

Saat ini, marga Semendo yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semendo yang darat, Mekakan Ulu, Mekekan Ilir, dan Bayur. Sedangkan marga semendo yang berada di Lampung meliputi marga Rebang, kasui, Seputih, Pugeng dan way Tenong. Marga Semendo yang ada di Bengkulu terdiri dari Marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung dan Nasal.

Mata pencaharian primer suku Semendo adalah bercocok tanam dan berkebun kopi, utamanya di dataran tinggi, seperti hulu sungai luas dan Mekakan serta di sekitar daerah Danau Ranau (Perbatasan antara propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung).

Keadaan semacam ini diperkuat oleh tingkat pendidikan yang umumnya masih "rendah", sehingga pengetahuan tentang alternatif diversifikasi mata pencaharian belum begitu menonjol. Sebagai indikasi dapat dikemukakan suasana pendidikan formal yang ada di kecamatan Semendo sebagai berikut:

Keadaan di kecamatan Semendo sekarang menunjukkan bahwa hampir seluruh kawasan merupakan tanah yang telah digarap orang atau tanah "Tunggu Tubang". Sebagian lagi merupakan hutan kawasan ex BW (Bosch wezen). Keterbatasan lahan ini juga menyebabkan banyaknya anggota masyarakat Suku Semendo mencari lahan baru di luar daerah Semendo untuk digarap. Bahkan Steven R. Brechin, et. al. (1993 : 238 – 239) dan Laurel Heydir (1993 : 79

– 80) menyatakan mengenai suku Semendo sebagai berikut:²⁹

"They have their own netive land, but Arable land is very limited. Many young families are in search of new farm. Their system of inheritence is "Tunggu Tubang" ... force the remaining family members to find new agriculture land elsewhere. So, we have found theirselves growing coffe in high land areas. Usually this forest land, as it the only land remaining."

Dari tabel-tabel yang disajikan, serta uraian yang dikemukakan, secara umum dapat dikatakan bahwa keadaan daerah asal suku Semendo pada tahun 1993 adalah:

1. terbatasnya lahan.
2. Kurangnya penyelenggaraan pendidikan formal tingkat menengah.

Gambaran di atas merupakan situasi yang perlu segera diatasi, karena untuk jangka panjang, bukan tidak mungkin dapat menambah persoalan

²⁹ Saut P. Panjaitan, *et. Al*, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Tradisi Menebang Hutan dan Membuka Lahan Hutan Pada Suku Semendo Sumatera Selatan (Studi Kasus di*

yang akan sulit dipecahkan. Keadaan semacam ini dapat menjadi faktor pendorong banyaknya anggota masyarakat suku Semendo yang merambah hutan kedaerah lain, terlepas dari motif atas alasan individual tertentu.

4.1.1.2 NILAI DAN KONSEPSI ADAT SUKU SEMENDO.

Sebagai suatu komunitas, maka dalam pergaulan sosialnya, suku Semendo memiliki organisasi, dan kelembagaan sosialnya, yang melandasi sikap dan perilaku kehidupannya. Oleh karena itu, "nilai" diartikan sebagai "ideas concerning desirable", yaitu idea, persepsi, dan anggapan mengenai apa yang patut (sayogya/ layak) yang harus dituruti (baik) dan apa yang semestinya tidak dituruti (buruk). "nilai" inilah yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penggerak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam kehidupan pergaulan sosial suku Semendo, terhadap banyak "nilai" yang diamati, diantaranya "seganti setungguan" dan "Tunggu Tubang".

4.1.1.3 NILAI DAN KONSEPSI ADAT "SEGANTI SETUNGGUAN"

Seganti setungguan "merupakan falsafah hidup lembaga Adat Lampik Empat Merdike Due Jurai Pasemah dan Samende. Tata nilai "Seganti setungguan" berisikan kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, falsafah, dan prasetia kehidupan yang mencakup sikap dan perilaku, larangan dan nilai pribadi dalam hidup bermasyarakat.

Adapun nilai yang konsepsi adat ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. DALAM SIKAP DAN PERILAKU KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

Sikap yang *pertama* yang dikembangkan dalam falsafah ini adalah sikap Lukhus Tali Belandar Papan Niat Iluk, Tertip Lukhus, Rusak adak Binase Dikde. Artinya lurus tali beralas papan, niat baik, tertip, lurus tidak rusak dan tidak binasa.

Maksud dari sikap ini, berbuat harus lurus, niat harus baik, menyukai ketertiban dan menjunjung tinggi peraturan. Kalau sikap itu dimiliki, niscaya dapat terhindar dari bahaya kebinasaan dan akan membawa kebahagiaan.

Sikap *kedua*, Janji Nunggu Katik Berlaruh, artinya janji ditunggu kata-kata mempunyai akibat. Maksudnya, setiap janji harus ditepati, waktu harus dihargai dan harus setia pada ucapannya (janjinya). Menurut falsafah ini, setiap kata yang telah terucap akan membawa dampak baik positif maupun negatif, sehingga pertimbangan sebelum blaya merupakan keharusan bagi masyarakat Semende.

Sikap *ketiga*, Utang Mbayar piutang ditagih, NeUkhang Ne Ukhang- Nde Dikhi. Artinya, setiap utang harus dibayar, piutang harus ditagih, kepunyaan orang punya orang dan kepunyaan sendiri milik sendiri.

Jika punya utang harus dibayar, jika punya piutang harus ditagih. Masyarakat Semende harus mampu memisahkan antara milik sendiri dan milik orang lain, sehingga secara jelas mengetahui

batas-batasnya. Lurus, jujur serta tidak sekehendak hati pada orang lain merupakan sikap hidup yang perlu dijunjung tinggi.

Sikap *keempat*, Pacak Ulak di Ula'l pacak jangan dihindari Takut jangan Belakhi melawan Jangan Njagal artinya dapat sabar di sabarkan dan dapat menghindar dihindarkan. maksud filsafat ini, segala bentuk persoalan harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Tentang dalam berpikir dan berbuat, bersikap, arif bijaksana dan tidak bertindak terburu-buru.

Berangkekelah Pedang Siagilah Jangan Kayik Simpanilah Senjata Bersihkanlah jalan ke Sungai. Artinya, simpanlah senjata, bersihkanlah jalan ke sungai. Maksud dari sikap hidup ini hentikanlah segala macam bentuk perselisihan dan jika mampu selesaikanlah perselisihan itu secara adil dan bijaksana agar tidak merugikan pihak manapun juga.

Disamping itu terdapat 5 (lima) nilai yang dikembangkan menurut adat "Seganti setungguan" dalam hidup bermasyarakat, yaitu;

Prinsip pertama, dalam masyarakat Semende adalah si Ati Serupuk'an Sipincang Sepejalanan, artinya bersatu hati bersatu pemikiran berjalan bersama-sama. Dalam kehidupan masyarakat ada kebersatuan perasaan dan kesatuan pemikiran, berjalan seiring untuk mengapai cita-cita bersama dan menegakprinsip musyawarah dan mufakat.

Prinsip kedua, sasaran sekundang se Khase Sepenanggungan, artinya semufakat saling membahu dan bertanggung jawab bersama-sama. Dalam masyarakat Semendo segala hal perlu dimusyawarahkan agar tercapai kemufakatan, setelah itu bersama-sama dan bahu-membahu mempertanggung jawabkan hasil keputusan musyawarah yang telah dimufakati.

Prinsip ketiga, Lukwi Pegarang Rakit Timbul Tengelim Same-Same Ye Kecil Nurut, Ye Besak Peralah, Ye mude Ngikut Ye Tue Ngipat, artinya seperti rotan pengikat rakit timbul tenggelam bersama-sama. Mereka yang kecil menurut, yang

besar toleransi, yang muda mengikuti dan yang tua menyusun.

Maksud prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga ada yang kecil, ada yang besar, ada yang muda dan yang tua. Kesemuanya harus menunjukkan peran yang sesuai dengan kedudukannya.

Bertindakalah sesuai dengan kodratnya, jadilah anak seperti anak, jadilah kakak seperti kakak jadilah pemuda seperti pemuda dan jadilah orang tua seperti orang tua.

Prinsip keempat, kecil besok bugae beline iluk buruk same mekhase. Artinya, kecil besar laku perempuan baik buruk sama dirasakan. Masyarakat Semende kecil besar dan tua muda merupakan satu kesatuan, maka hendaknya yang baik sama-sama dirasakan, yang buruk sama-sama dipikul dan yang kurang sama-sama dicukupi.

Prinsip terakhir, dalam hidup bermasyarakat adalah se khepat luk sukat-sekachung luk tabung, artinya, rata seperti pengukur runcing seperti runcingan. Apabila

melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu harus sesuai dengan kenyataannya.

b. DALAM HAL LARANGAN-LARANGAN

Pada falsafah seganti setungguan terdapat beberapa perilaku yang harus dihindari, hal ini berupa larangan-larangan yang sangat prinsip pada masyarakat semende. Larangan-larangan itu seperti jangan berpura-pura seperti wali, orang keramat, sakti, pintar, agung, jangan mencuri, sombong, berbohong, memfitnah dan berzina.

Masyarakat semende jangan cacak wali (jangan berpura-pura wali). Artinya, tak benar orang Semende mengaku dirinya wali, sebab wali adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Jangan cacak keramat, (jangan berpura-pura keramat). Artinya jangan mengaku sok suci, sebab sok keramat (suci) berarti menjauhkan diri dari Tuhan.

Jangan cacak sakti, jangan cacak-cacak, dan jangan cacak agung (jangan pura-pura sakti, pura-pura pintar pura-pura agung) maksudnya masyarakat semende dilarang keras untuk

berprilaku berpura-pura pintar dan berpura-pura agung. Hal itu akan menjerumuskan penipuan, membahayakan dan berlebihan yang akhirnya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

c. DALAM HAL NILAI / PRIBADI

Sebagai salah satu aset sumber daya manusia, maka orang semende harus memiliki nilai pribadi yang harus dikembangkan menurut falsafah seganti setungguan meliputi lima nilai dasar, sebagai acuan masyarakat semende meraih masa depan yang lebih baik.

Nilai pribadi tersebut meliputi: orang semende haruslah pintar, setia, berani, penuh perhitungan dan teliti. Ndak calak (haruslah pintar) artinya, masyarakat semende haruslah memiliki ilmu pengetahuan, baik untuk dunia maupun akherat.

Ndaklah beganti (haruslah setia) artinya, rasa bertanggung jawab, solidaritas dan kesetiaan merupakan unsur penopang jiwa tolong menolong dan rela berkorban dalam suatu masyarakat demi terwujudnya kesatuan dan persatuan.

Ndaklah melawan (haruslah berani) artinya masyarakat semende dalam menghadapi masalah haruslah memiliki keberanian yang penuh dan keyakinan yang optimisme. Kunci pokok dari keberanian adalah kepercayaan terhadap diri sendiri dan menghindari sikap nrimo atau pasrah.

Ndak bekencean (haruslah penuh perhitungan). Artinya, dalam menghadapi sesuatu persoalan sebetapapun rumitnya, masyarakat semende harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis situasi dan penuh perhitungan. Bukan saja keuntungan dan kerugian saja, tetapi meliputi kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul dari persoalan itu harus diperhitungkan.

Nilai pribadi yang perlu dipertahankan dari falsafah *seganti setungguan* adalah *ndaklah sepade bepenampe* (haruslah teliti dan kewaspadaan). Artinya, masyarakat semende perlu memiliki ketelitian, tidak ceroboh dan kewaspadaan, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak.

Dari uraian diatas diperoleh kesan yang sangat positif mengenai nilai-nilai dan falsafah hidup, yang melandasi sikap dan prilaku kehidupan orang suku Semendo. Sikap dan prilaku positif dimaksud adalah harus ditanamkannya nilai-nilai: kesetiaan, optimisme dalam hidup, bijaksana, bertanggung jawab dan menaati peraturan yang ada.

4.1.2. NILAI DAN KONSEPSI ADAT “ TUNGGU TUBANG”

Selain nilai dan konsepsi adat “seganti setungguan”, nilai dan konsepsi adat yang menonjol pada masyarakat semendo adalah “Tunggu Tubang” yang mengharuskan anak perempuan tertua sebagai pemelihara dan penerus harta

bersama keluarga (rumah, sawah, kebun, tambak dan sebagainya). Harta tersebut bukan berarti dimiliki oleh anak perempuan tadi. Hak kepemilikan tetap ada pada keluarga besar.

Sekarang dalam hal lalu lintas perbankan, harta yang dipelihara anak Tunggu Tubang tadi terbukti tidak dapat (tidak diterima oleh bank) dijaminkan. Prinsip keutamaan anak wanita tertua ini, sekilas memang ada persamaan dengan adat minangkabau. Bahkan manakala dilihat arsitektur rumah tradisional semendo, memiliki kemiripan dengan rumah tradisional Minangkabau.

Konsep "Tunggu Tubang" ini menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "mencar" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "anak ambur-amburan" atau "semendo rajo-rajo"). Ditetapkannya anak wanita sebagai "Tunggu Tubang" dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta "Tunggu Tubang" dijual atau dipindahkan kepada orang lain. Jadi "Tunggu Tubang" mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga.

Falsafah dari adat ini adalah bahwa 'Tunggu Tubang' merupakan pusat jala, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa 'Tunggu Tubang', utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) di manapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian 'Tunggu Tubang' merupakan simbol untuk mengetahui asal usul keluarga.

Selain "jala" dalam adat 'Tunggu Tubang' ini juga harus ada balau (tombak), kapak, dan guci. Balau (tombak), artinya bila diminta kesana-kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berarti bahwa dalam mengapak harus ditengah-tengah. Dalam mengurus keluarga harus dari kedua belah pihak. Guci, berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dijaga dengan rapat.

Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat 'Tunggu Tubang', mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya pencarian sumber penghidupan baru ini sangat tergantung kepada hutan, yang kemudian dirambah.

Dalam melakukan perambahan hutan, anggota masyarakat semendo, dalam banyak hal belum memperhatikan nilai-nilai konservasi sumber daya alam, baik dalam hal pemanfaatan, pengawetan maupun perlindungan lingkungan. Motif dan dorongan ekonomis menyebabkan mereka mengabaikan nilai-nilai konservasi tersebut.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1. IMPLEMENTASI KONSEP TUNGGU TUBANG DI MASYARAKAT ADAT SEMENDO

Harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi ini, berdasarkan atas alasannya tidak dibagi-bagi, dapat dibedakan sebagai berikut:³⁰

- a. Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang-barang milik kerabat atau famili);
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatan tertentu (contohnya barang-barang keramat keraton Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh pada ahli waris yang menjadi Sultan Sepuh serta barang-barang itu tetap disimpan di keraton Kasepuhan);

³⁰ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas –Asas Hukum Adat*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995 Hal 166

- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah kasikepan di daerah Cirebon;
- d. Karena pembagiannya untuk sementara waktu ditunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terhadap anak-anak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagikan dari ahli waris yang menurut hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anak tersebut selalu akan ditolak hakim;
- e. Karena hanya diwaris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.

Dari hasil penelitian bila dikaitkan dengan ke lima alasan tersebut diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adat Suku semendo di Kota Palembang menganut alasan point e dimana Harta peninggalan yang mencakup semua jenis barang yang ada pada harta peninggalan, itu tidak dibagi-bagi dan langsung secara otomatis jatuh ketangan anak perempuan tertua yang disebut juga *Tunggu Tubang*, didalam pemeliharaan harta peninggalan oleh *Tunggu Tubang* tersebut diawasi oleh seorang payung jurai yang biasanya adalah seorang anak laki-laki tertua.

Adanya konsep "*Tunggu Tubang*" ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "*mencar*" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "*anak ambur-amburan*" atau '*semendo rajo-rajo*'). Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat '*Tunggu Tubang*', mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya pencarian sumber penghidupan baru ini sangat tergantung kepada hutan, yang kemudian dirambah, hal ini terpaksa dilakukan karena kurangnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan lingkungan dari masyarakat adat Suku Semendo.³¹

Anak wanita tertua ditetapkannya sebagai anak "*Tunggu Tubang*" dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau dan lemah dilihat dari segi fisik, juga di dasari oleh adanya kemungkinan harta "*Tunggu Tubang*" dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi anak '*Tunggu Tubang*' mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, untuk memelihara adik-adiknya sampai dewasa dan bisa mencari penghidupan sendiri.³²

³¹ Wawancara dengan Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) Kota Palembang tanggal 23 Juli 2003

³² Wawancara dengan R.A. Halimah, seorang anak *Tunggu Tubang* di Kota Palembang tanggal 24 Juli 2003

Dalam *Tunggu Tubang* terdapat falsafah dari adat ini adalah bahwa '*Tunggu Tubang*' merupakan pusat jala, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa '*Tunggu Tubang*', utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) di manapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian '*Tunggu Tubang*' merupakan simbol untuk mengetahui asal usul suatu keluarga, hal ini biasa terlihat khususnya pada saat Hari Raya umat Islam misalnya Idul Fitri semua anggota keluarga yang awalnya mencar untuk mencari penghidupan dilain tempat berkumpul di rumah *Tunggu Tubang* untuk sekedar melepas rindu dengan keluarga.³³

Dalam adat '*Tunggu Tubang*' ini juga harus ada balau (tombak), kapak, dan guci. balau (tombak), artinya bila diminta kesana-kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berarti bahwa dalam mengapak harus ditengah-tengah. Dalam mengurus keluarga harus dari kedua belah pihak. Guci, berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dijaga dengan rapat. Hal ini terlihat dalam pengurusan harta peninggalan oleh anak *Tunggu Tubang*, bila ada salah satu anggota keluarga yang membutuhkan

³³ Wawancara dengan R.A. Zaleha, seorang anak *Tunggu Tubang* di Kota Palembang tanggal 24 Juli 2003

bantuan, maka anggota keluarga yang lain akan serta merta akan membantu. Tetapi ada juga yang memanfaatkan kedudukannya sebagai anak Tunggu Tubang lalu menjual harta Tunggu Tubang tersebut dengan dalih untuk biaya hidup dari saudara-saudaranya namun tidak demikian kenyataannya.³⁴

4.2.2. PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PEWARISAN DALAM MASYARAKAT ADAT SEMENDO DI KOTA PALEMBANG

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriil goederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut mulai pada waktu orang tua kepada turunannya. Seperti hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa masyarakat adat Semendo ini memiliki sistem kewarisan mayorat, dimana penguasaan tunggal atas harta peninggalan ditangan anak tertua perempuan. Bila terjadi anak sulung tersebut menjual atau mengadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena satu kewenangan yang sah, melainkan karena kekuasaan dari anak Tunggu Tubang semata, maka tindakan dari anak

³⁴ Wawancara dengan Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) di Kota Palembang tanggal 23 Juli 2003

Tunggu Tubang tersebut bisa dituntut oleh saudara-saudaranya yang lain. Karena pada prinsipnya setiap individu memiliki hak mewaris dari harta orang tuanya.³⁵

Menurut Hilman Hadikusuma, Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektif, dimana seorang anak Tunggu Tubang hanya meneruskan dan akan mengalihkan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu untuk sementara waktu dipegang oleh anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan Ayah atau Ibu sebagai Kepala Keluarga.³⁶

³⁵ I.G.N. Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.12

³⁶ *Loc. Cit.*

Ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja.

Sistem mayorat ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu:³⁷

1. Mayorat Lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung.
2. Mayorat Perempuan, seperti ini berlaku di lingkungan masyarakat adat Semendo Sumatera Selatan.

Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam wadah kekerabatan mereka yang turun temurun.

Seperti halnya dengan sistem kolektif, dan menikmati harta bersama itu, tanpa menguasai atau memiliki secara perseorangan. Kalau dilihat dari hasil penelitian ini secara nyata dalam masyarakat semendo di Kota Palembang, sistem kewarisan mayoratnya, dewasa

³⁷. Soerojo Wignjodipoero, *Op. Cit*, hal. 105.

ini merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua perempuan (Tunggu Tubang).

Hal ini diperkuat oleh adanya kasus yang ditemukan di lapangan dimana harta Tunggu Tubang itu dibagi-bagi secara proporsional kemasing-masing ahli waris yang ada, harta Tunggu Tubang ini dibagi-bagi untuk masing-masing ahli waris yang sangat membutuhkan karena kesulitan ekonomi. Proses pembagian harta Tunggu Tubang ini dimulai dengan adanya permohonan dari saudara anak Tunggu Tubang tersebut kepada Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) dalam hal ini yang membawahi wilayah kedudukan anak Tunggu Tubang tersebut, lalu Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) akan memanggil anak Tunggu Tubang dan saudara-saudaranya tersebut untuk diadakan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh Ketua Kerukunan Keluarga Semendo (KKS), musyawarah ini diawali dengan mendengarkan alasan permohonan dari saudara anak Tunggu Tubang yang menginginkan harta Tunggu Tubang tersebut dibagi-bagi, lalu Ketua

Kerukunan Keluarga Semendo (KKS) akan menanyakan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudara-saudara anak Tunggu Tubang tersebut baik kepada anak Tunggu Tubang maupun kepada saudara yang lain. Setelah itu baru menanyakan kesediaan anak Tunggu Tubang untuk merelakan harta Tunggu Tubang tersebut dibagi-bagi dan juga memberikan nasehat-nasehat tentang fungsi dari harta Tunggu Tubang tersebut dan apabila ada keadaan tertentu harta Tunggu Tubang tersebut bisa dibagi-bagi. jadi harta Tunggu Tubang ini tidak semata-mata hanya dikuasai dan dinikmati oleh anak Tunggu Tubang saja, melainkan juga digunakan demi kesejahteraan keluarga besar dari anak Tunggu Tubang dan saudara-saudaranya.

Pergeseren nilai-nilai pada konsep harta Tunggu Tubang (kewarisan) ini tidak diikuti oleh adanya pergeseran adat Semendo yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Semendo di Kota Palembang misalnya keberadaan anak Tunggu Tubang sampai sekarang masih dipertahankan, hal ini bisa dibuktikan walaupun harta Tunggu Tubang sudah tidak ada dalam arti sudah dibagi-bagi tetapi pada saat hari-hari raya umat Islam pasti secara otomatis saudara-saudara dari anak

Tunggu Tubang tersebut. Hal ini sejalan dengan falsafah dari adat bahwa 'Tunggu Tubang' merupakan pusat jala, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul, yang merupakan simbol bahwa 'Tunggu Tubang', utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) di manapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian 'Tunggu Tubang' merupakan simbol untuk mengetahui asal usul suatu keluarga.

Dari hasil penelitian yang disajikan sebelumnya dikaitkan dengan adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran-pergeseran tersebut dipengaruhi oleh:

1. Semakin meningkatnya mutu dan tingkat pendidikan masyarakat semendo di Kota Palembang;
2. Kemudian meningkatnya taraf hidup yang dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat semendo di Kota Palembang;
3. Dan adanya pengaruh keagamaan.

Keagamaan (*religius*) bersifat kesatuan batin, orang segolongan merasa satu dengan golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya (*levensmilieu*). Yang mana dalam masyarakat suku Semendo 100 % Islam maka pengaruh-pengaruh dari budaya islam mempercepat adanya pergeseran nilai-nilai yang lebih menekankan adanya persamaan hak antara laki-laki dan perempuan

Dalam dunia perbankan khususnya di wilayah Kota Palembang, harta yang dipelihara anak Tunggu Tubang tidak bisa dijadikan agunan suatu kredit dalam bentuk apapun. Hal ini juga membuktikan bahwa harta Tunggu Tubang sangat diakui oleh masyarakat umum.

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

1. Adanya konsep "*Tunggu Tubang*" ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga "*mencar*" mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut "*anak ambur-amburan*" atau "*semendò rajo-rajo*"). Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat '*Tunggu Tubang*', mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya pencarian sumber penghidupan baru, dengan merantau ke ibukota Sumatera Selatan yaitu kota Palembang, sehingga dengan berbaurnya masyarakat suku Semendo pada budaya yang beraneka ragam maka konsep tunggu tubang mengalami pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat suku Semendo di perantauan. Dimana harta tunggu tubang dapat dibagi-bagi kepada ahli waris lainnya, karena harta tunggu tubang itu sendiri berupa barang-barang tidak bergerak misalnya rumah, tanah, dan lain-lain juga barang-barang bergerak misalnya : mobil, motor, alat-alat elektronik, perhiasan dan lain-lainnya yang

merupakan harta-harta relatif berharga nilainya dan dapat menopang kesejahteraan para ahli waris. Berbeda dengan harta tunggu tubang daerah asal pada umumnya adalah rumah tua, kebun, dan sawah yang relatif tidak berharga.

2. Sistem kewarisan mayorat di masyarakat adat Semendo di Kota Palembang dewasa ini merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua perempuan (Tunggu Tubang). Adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo atau dengan kata lain sistem kewarisan mayorat secara berangsur-angsur akan beralih ke sistem kewarisan individual yang parental sebagai akibat kemajuan dan teknologi dan bertambah luasnya pergaulan masyarakat, secara lebih spesifik karena adanya pengaruh:
 - a. Semakin meningkatnya mutu dan tingkat pendidikan masyarakat semendo di Kota Palembang;
 - b. Kemudian meningkatnya taraf hidup yang dapat dilihat dari pekerjaan masyarakat semendo di Kota Palembang;
 - c. Dan adanya pengaruh agama.

5.2. SARAN-SARAN

1. Hendaknya dibentuk suatu kompilasi hukum adat yang mengatur tentang sistem kewarisan adat Suku Semendo untuk suatu kepastian hukum,
2. Untuk mewujudkan adanya kompilasi hukum adat Suku Semendo perlu adanya penelitian hukum adat yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar S. Subari, *Kewarisan Adat (Teori Dan Praktek)*, Citra Bina Sejahtera, Palembang, 1993;
- Ali Afandi., *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kiteh Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. PT Bina Aksara. Jakarta. 1984.
- Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral*, Tinta Mas, Jakarta, 1974.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkaninan Adat*, Alumni, Bandung, 1983,
- _____, *Pengantar Hukum Adat*, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- _____, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, Penerbit P.T. Aditya Bhakti, Bandung 1991.
- _____, *Hukum Waris Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999,
- Iman Sudiayat, *Hukum Adat , Sketsa Asas* ,Liberty, Jogyakarta, 1988,
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan Ke III. PN Balai Pustaka. Jakarta. 1980.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, P.T. Remaja Rosda Karya, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Saut P. Panjaitan, *et. Al*, *Konservasi Sumber Daya Alam Dalam Tradisi Menebang Hutan dan Membuka Lahan Hutan Pada Suku Semendo Sumatera Selatan (Studi Kasus di Kawasan Suaka Margasatwa Gunung Raya Kabupaten OKU Sumatera Selatan)*, Pusat Penelitian Lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya, 1994.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.

Soerjono Soekanto, *Kedudukan Janda Menurut Hukum waris Adat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, *Hukum Adat Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1983,

_____, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, 1983.

Soerjono Soekanto dan Soeleman B. Taneko. *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali. Jakarta. 1982.

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Cetakan 12. CV Haji Masagung, Jakarta. 1994.

Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, Bandung, Eresco, 1987,

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, ANDI, Yogyakarta, 2000